



Bulletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**BBJ Sasar
Pasar Kamboja**

**Sosialisasi Sistem
Perdagangan GKR
Melalui Pasar Lelang**

**Bappebti Tingkatkan
Sinergitas Berantas
Pelanggaran PBK**

Pasar Lelang GKR

Adil Untuk 'si Kecil'



BERITA UTAMA | 04



Pasar Lelang GKR: Adil Untuk 'si Kecil'

Pemerintah mewajibkan perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas. Apa manfaat dan bagaimana mekanismenya?

BERJANGKA

Perppu No. 1 Tahun 2017
Ciptakan Transparansi
Industri PBK

07



PASAR

Bappebti dan Aspebtindo Gelar
12 Titik Pasar Murah Ramadhan

12



BERJANGKA | 08

BBJ Sasar
Pasar Kamboja

RESI GUDANG | 10

Pemprov Babel
Bakal Jajal SRG Lada

AKTUALITA | 16

PPH Final Rendah Bakal Dorong
Transaksi Multilateral

ANALISA | 18

Harga Lada Anjlok, Pemprov Babel
Datangkan Pembeli Mancanegara

KOLOM | 24

Perdagangan Gula Rafinasi
Melalui Pasar Terorganisir

KIPRAH

Henry Chandra
ILB Lumbung Timah Ekspor

26



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab

Bachrul Chairi

Redaktur

Nusa Eka

Penyunting/ Editor

Fajarini Puntodewi
Annisa F Wulandari
Apriliyanto

Fotografer

Gita Regina
Leli Wulandari

Sekretaris

Katimin

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat

 Bappebti Kementerian Perdagangan
 @InfoBappebti
 @Bappebti

Redaksi menerima artikel ataupun
opini dikirim lengkap dengan identitas
serta foto ke E-mail:
humas.bappebti@kemendag.go.id



Kepala Bappebti, Bachrul Chairi beserta Pejabat Eselon II Bappebti menerima kunjungan Inspektur Jenderal Kemendag, Srie Agustina, Jumat (2/06). Irjen Kemendag mengunjungi UPTP II dalam rangka monitoring proses perizinan online yang ada di Bappebti, selain itu juga membuka secara resmi kegiatan pemeriksaan tim Inspektorat Jenderal di Bappebti.

Redaksi secara khusus menyampaikan salam “Selamat Idul Fitri 1438 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin.”

Pembaca budiman, pada penerbitan Buletin Bappebti Edisi Juni 2017, ini, di rubrik Berita Utama Redaksi kembali mengupas mekanisme dan manfaat Pasar Lelang Komoditas Gula Kristal Rafinasi- GKR bagi dunia usaha khususnya pelaku usaha UMKM. Seperti diketahui, Pasar Lelang GKR ditujukan pemerintah untuk mencegah peredaran secara ilegal di masyarakat dan dapat meningkatkan daya saing UMKM karena ada jaminan pasokan.

Di sisi lain, Pasar Lelang GKR dapat menciptakan pasar yang fair dan transparan sehingga stabilitas harga dapat tercapai dan pada akhirnya lonjakan inflasi dari sektor kebutuhan bahan pokok bisa ditekan.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dengan meluncurkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017, tentang Perdagangan GKR melalui Pasar Lelang Komoditas, sejatinya perlu didorong dan mendapat dukung dari semua pihak. Sebab, mekanisme Pasar Lelang ini akan membudayakan baik masyarakat maupun dunia usaha berkompetisi secara fair dan transparan.

Dan yang lebih penting lagi, dalam jangka panjang akan membuka peluang investasi perkebunan tebu dan pabrikan gula di dalam negeri. Karena, hampir 30 tahun lamanya Indonesia sangat ketergantungan dengan gula impor. Hal itu disebabkan beralih fungsinya lahan

tebu pada sektor yang lebih produktif sehingga berdampak menyusutnya jumlah pasokan tebu ke pabrik gula. Alhasil, pabrik gula pun menjadi tak efisien dan banyak yang gulung tikar.

Dibagian lain, Redaksi juga menyuguhkan laporan kerjasama Bursa Berjangka Jakarta dengan *Phnom Penh Derivative Exchange-PPDE*. Kerjasama antar dua bursa berjangka ini diharapkan bisa mendongkrak volume transaksi dan terjadi transfer teknologi sistem perdagangan bursa berjangka.

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, yang hadir menyaksikan kerjasama antar dua bursa berjangka itu pun dalam menaruh harapannya. Dikatakan, kerjasama itu merupakan langkah strategis untuk mengembangkan bursa berjangka di dalam negeri. “Investor asing akan semakin banyak masuk ke perdagangan berjangka di dalam negeri. Apalagi, impor minyak goreng Kamboja dari Indonesia terbilang cukup tinggi,” katanya.

Terakhir, Redaksi juga menyampaikan apresiasi bagi pelaku industri perdagangan berjangka komoditi yang tergabung di Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pasar murah pada program Kementerian Perdagangan. Selama bulan ramadhan, lalu, ada sebanyak 12 titik pasar murah yang digelar di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Semoga program kerjasama lainnya dapat dilaksanakan di masa mendatang.

Salam!



Pasar Lelang GKR

Adil Untuk ‘si Kecil’

Pemerintah mewajibkan perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas. Apa manfaat dan bagaimana mekanismenya?

Peredaran komoditi gula di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar pasar. Yakni, pertama, pasar gula konsumsi domestik yang diproduksi oleh pabrik gula BUMN dan swasta, dengan bahan baku tebu lokal. Produk gula ini sering disebut Gula Kristal Putih- GKP, dan perkiraan kebutuhan di dalam negeri mencapai 2,95 juta ton per tahun.

Kedua, pasar gula untuk keperluan industri makanan, minuman, dan farmasi yang dipasok dari pabrik gula rafinasi, dengan bahan baku gula mentah- *raw sugar* yang diperoleh dari impor. Produk gula ini sering disebut Gula Kristal Rafinasi- GKR. Perkiraan kebutuhan GKR di dalam negeri mencapai 3,03 jt ton per tahun.

Dari tahun ke tahun, dua jenis pasar gula itu saling bergesekan. Sebab, produk GKR kerap ditemukan merembes ke pasar gula konsumsi. Berdasarkan angka perkiraan Kementerian Perdagangan, rembesan GKR mencapai 200.000 - 300.000 ton per tahun. Pada hal sesuai ketentuannya, GKR hanya diperuntukkan untuk industri dan tidak boleh disalurkan ke pasar konsumsi.

Terang saja kondisi ini membuat para petani menjadi berang, lantaran harga gula produksi lokal cukup tertekan. Memang harus diakui, gula petani lokal tak mampu bersaing dengan GKR. Sebab, harga gula impor lebih murah dan mutunya lebih baik.

Di sisi lain, industri makanan minuman skala kecil juga kerap tersisih dengan industri besar untuk mendapatkan GKR. Maka tak heran industri kecil menggunakan gula kristal putih dari pasar konsumsi sebagai bahan bakunya, yang tentu saja harganya relatif lebih mahal.

Jadi, jika harga gula di pasar konsumsi naik, maka produk makanan minuman dari industri kecil juga akan ikut mengalami kenaikan.

Untuk memenuhi kebutuhan gula di

dalam negeri, baik gula konsumsi dan kebutuhan industri makanan dan minuman, beragam peraturan telah ditetapkan pemerintah. Namun tetap saja setiap tahun hiruk pikuk masalah gula belum bisa diatasi.

Kabar baiknya, Maret 2017 lalu, Kementerian Perdagangan menetapkan GKR yang diproses dari gula mentah impor-*raw sugar* hanya diperdagangkan melalui mekanisme pasar lelang komoditas- PLK. Hal ini dilakukan untuk memotong mata rantai pemasaran dan distribusi yang panjang.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-DAG/PER/3/2017, tentang Perdagangan GKR melalui Pasar Lelang Komoditas. Permendag ini diundangkan pada 17 maret 2017, lalu, dan mulai berlaku 90 hari sejak diundangkan, atau sekitar Juli mendatang.

Dan saat Permendag No. 16 Tahun 2017, berlaku, maka ketentuan mengenai Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi- SPPA GKR dalam Permendag No. 74/M-DAG/PER/9/2015, tentang Perdagangan Antarpulau GKR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Meski begitu, Kemendag memutuskan untuk menunda implementasi pasar lelang GKR yang seharusnya dimulai pada Juli 2017. Mendag Enggartiasto Lukita menjelaskan, penundaan tersebut lebih disebabkan perlunya sosialisasi yang lebih mendalam bagi pelaku usaha terkait bagaimana penyelenggaraan lelang GKR.

"Lelang gula akan kami tunda dulu, walaupun catatannya, idealismenya tidak berubah. Ini keberpihakan kita kepada Usaha Kecil Menengah yang selama ini membeli gula dengan harga mahal dibandingkan industri besar," kata Enggar.

Dia juga menekankan skema lelang GKR tersebut bertujuan untuk memberikan akses yang sama antara pelaku usaha kecil dengan industri besar. "Selama ini, usaha skala kecil banyak mendapatkan bahan baku gula dengan harga lebih tinggi, sementara industri besar mendapatkan dengan harga lebih murah." "Berikan pada UKM itu akses yang adil, bagaimana mereka bisa berkembang jika sumber bahan bakunya berbeda. Ini hanya ditunda, bukan dibatalkan," tegas Enggartiasto Lukita.

Manfaat

Mendag Enggartiasto Lukita menjelaskan Permendag No. 16 Tahun 2017, diterbitkan untuk menjamin dan menjaga ketersediaan, penyebaran, dan stabilitas harga gula nasional, serta memberi kesempatan usaha yang sama bagi industri besar dan kecil dalam memperoleh GKR. "Dengan mekanisme pasar lelang diharapkan harga yang diterima di tingkat industri makanan dan minuman akan lebih terjangkau," ujarnya.

Sebagai informasi, PLK merupakan pasar fisik terorganisir bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang secara online, dengan penjaminan transaksi dan penyerahan komoditas. Adapun instrumen PLK di bawah pembinaan dan pengawasan Bappebti.

Jadi, nantinya produsen GKR yang mengimpor gula kristal mentah wajib menjual hasilnya melalui pasar lelang komoditas. Dengan demikian, penjualan GKR tanpa melibatkan pihak ketiga, atau dari produsen (pabrik GKR) langsung kepada industri pengguna, baik skala kecil maupun besar tanpa melalui distributor.

Pola pembelian semacam ini tidak dimungkinkan dalam mekanisme sebelumnya. Sebab, pembelian skala kecil hanya bisa dilakukan melalui distributor. Dan akibatnya pengusaha kecil akan mendapat harga lebih tinggi dibandingkan industri besar yang bisa bertransaksi langsung ke pabrik.

Tapi sebagai catatan, Permendag No. 16 Tahun 2017 tersebut tidak berlaku bagi Industri pengguna gula kristal mentah dan GKR dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor- KITE yang hasil produksinya kemudian ditujukan untuk ekspor.

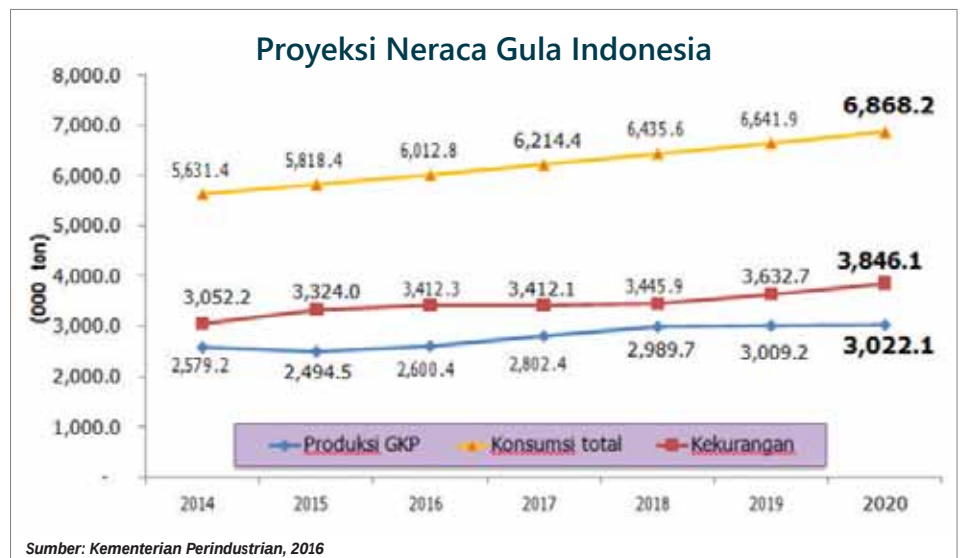
Permendag No. 16 Tahun 2017 juga menyebutkan, pelaksanaan pasar lelang GKR akan memberi kemudahan pengawasan gula yang akurat dan akuntabel. Karena perdagangan GKR akan dilengkapi *electronic barcode* (e-Barcode) dan dilakukan satu pintu melalui pasar lelang *online*.

Dengan sistem *e-Barcode*, maka dapat membantu pengawasan dalam mencegah perembesan atau penimbunan GKR. Kode unik yang terkandung dalam *e-Barcode* mengandung informasi dan histori perdagangan GKR yang lengkap dan akurat, mulai dari proses importasi bahan baku, produksi, penjualan, pembelian, serta distribusi gula. Data dan informasi juga dapat diakses secara *realtime* dan *online*.

Langkah tersebut bisa menjadi solusi atas maraknya peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi. Sebab dengan sistem *e-Barcode* maka bisa dilacak siapa pemilik gula rafinasi tersebut dan dapat dikenakan sanksi.

Pasar Lelang GKR

Setelah melewati mekanisme pengadaan barang dan atau jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan



peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya proses tender terbuka ini telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan c.q. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, mulai dari proses pengumuman penawaran paket lelang, anwijzing, penetapan pemenang lelang sampai dengan penetapan sebagai Penyelenggara Lelang GKR.

Kementerian Perdagangan menetapkan PT. Pasar Komoditas Jakarta- PKJ sebagai pemenang operator pelaksana Pasar Lelang GKR, "Dari empat perusahaan yang melalui proses tender, sudah kami pilih satu sebagai sebagai penyelenggara," terang Kepala Bappebti, Bachrul Chairi.

Penetapan itu juga disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 684/M-DAG/KEP/5/2017 tentang Penetapan Penyelenggara Pasar Lelang GKR. Dengan ditetapkannya PT PKJ, maka lelang GKR dapat segera dilaksanakan.

Dalam pengertiannya, Pasar Lelang GKR merupakan pasar lelang elektronik yang menyelenggarakan transaksi jual beli GKR secara *online* dan *real time* dengan metode Permintaan Beli (*Bid*) dan Penawaran Jual (*Offer*). Volume penjual atau pembeli sebanyak 1 ton, 5 ton, dan 25 ton.

Dalam waktu dekat, proses penyelenggaraan lelang GKR secara *online* ini akan disosialisasikan oleh PT. PKJ sebagai penyelenggara lelang GKR ke beberapa wilayah di Indonesia. Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, menegaskan, pengaturan perdagangan GKR melalui pasar lelang tidak mengubah kegiatan bisnis industri pengguna GKR.

"Hanya terdapat perubahan pencatatan menjadi secara elektronik- *online* pada sistem yang dibangun sehingga dapat mempermudah pengawasan GKR yang beredar," terang Bachrul.

Sementara itu, aturan lebih lanjut terkait mekanisme transaksi, penetapan biaya, penyimpanan dan penyerahan barang, perlindungan informasi data perusahaan (pembeli), serta hal-hal lain yang dianggap perlu akan dituangkan pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan GKR dan Peraturan dan Tata Tertib- PTT Pasar Lelang GKR.

Saat ini, Bappebti telah memiliki data-

data perusahaan yang biasa melakukan transaksi GKR dalam jumlah besar. Bila belum terdaftar, perusahaan yang ingin ikut serta dalam lelang dapat melakukan pendaftaran *online*. Nantinya, transaksi lelang GKR akan tercatat di dalam *machine engine* milik bursa berjangka dan menggunakan sistem *e-barcoding*.

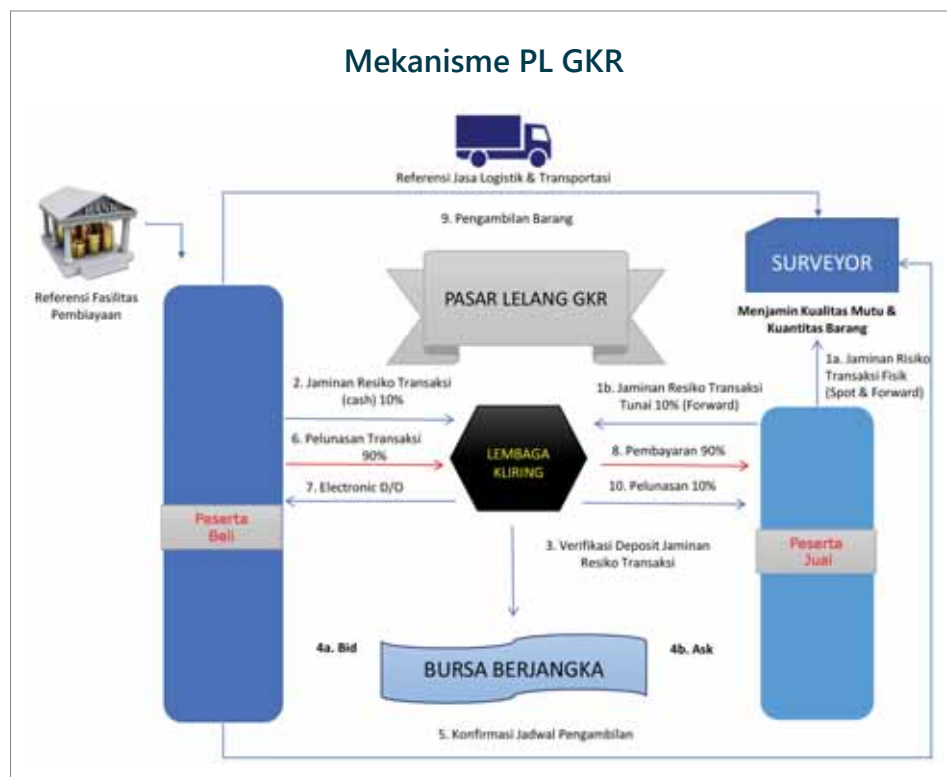
Dengan *e-barcoding*, Bappebti bisa memonitor, misalnya 10 kg gula di Brebes dapat diketahui berasal dari Australia, Brasil, atau Thailand. "Kapan gula tersebut dikirim, menggunakan kapal apa, itu bisa diketahui. Jadi bisa tahu perusahaan yang jual, tahan, atau bocorkan," jelas Bachrul Chairi.

Dia juga bilang, dalam setahun jumlah kebutuhan gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman domestik sekitar 2,5 juta ton. Diperkirakan volume GKR yang masuk dalam pasar lelang komoditas nanti bisa mencapai 50 % dari jumlah tersebut.

Sementara itu, peserta jual dalam pasar lelang GKR harus melengkapi beberapa dokumen persyaratan. Diantaranya Akta Pendirian Perusahaan; Akta Anggaran Dasar;

Akta Susunan Direksi dan Komisaris; Akta Pengesahan, Persetujuan, dan Penerimaan dari Kemenkumham; Kartu Identitas Direksi; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Keterangan Domisili Perseroan (SKDP); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin lainnya; Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Surat Pernyataan Keanggotaan; Persetujuan Impor yang dimiliki dan masih berlaku; Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P); Nomor Induk Kependudukan (NIK); Domisili Gudang; Surat Pernyataan Kepesertaan Peserta Jual; dan scan Surat Izin Usaha Industri.

Sedangkan peserta beli juga harus melengkapi beberapa dokumen persyaratan. Diantaranya, Akta Pendirian Perusahaan; Akta Perubahan Anggaran Dasar; Akta Pengesahan, Persetujuan dan Penerimaan dari Kemenkumham; Kartu Identitas Direksi; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Keterangan Domisili Perseroan (SKDP); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Rekomendasi / perizinan dari kementerian terkait; dan Surat Pernyataan Keanggotaan. 



Perppu No. 1 Tahun 2017

Ciptakan Transparansi Industri PBK

Perppu No. 1 Tahun 2017, menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk kemudahan pengawasan dan penindakan oleh otoritas berwewenang layaknya Bappebti. Kebijakan ini akan membuat industri PBK lebih fair dan transparan serta dapat meningkatkan likuiditas.



Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, menurut Perppu ini, meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Aturan yang ditandatangani dan diundangkan pada 8 Mei 2017, ini, juga menegaskan, Direktur Jenderal Pajak- DJP berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Aturan itu tentu saja memasukkan industri perdagangan berjangka komoditi- PBK menjadi salah satu objek sasarannya. Dengan demikian, DJP juga berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari semua pihak yang ada di industri PBK.

Terkait itu, Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, mengatakan, sebelum *beleid* tersebut

diundangkan, pihaknya juga terlibat dalam penyusunan peraturan. "Konteks umum peraturan tersebut ialah mempersiapkan evaluasi keuangan di tanah air sesuai rekomendasi *Financial Action Task Force- FATF* dan berkaitan dengan usulan dari negara G-20," katanya.

Penekanan utama Perppu ini adalah keterbukaan informasi nasabah untuk kegiatan perpajakan sekaligus kejelasan aliran dana. Alhasil dana yang berasal dari pencucian uang ataupun aksi terorisme bisa dihindari.

"Dengan adanya peraturan ini membuat Bappebti lebih mudah dalam pengawasan. Tentunya transparansi lebih bagus bagi industri PBK, karena dinilai bersih maka akan tercipta kepercayaan masyarakat dan positifnya dapat meningkatkan volume transaksi pelaku pasar," ujar Bachrul.

Kebijakan Preventif

Sekedar informasi, Bappebti telah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan- PPATK untuk mencegah tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam industri PBK. Langkah tersebut dilakukan untuk pertukaran informasi mengenai transaksi yang mencurigakan dan koordinasi perihal sanksi administratif.

Bappebti juga telah menyelesaikan dua dokumen kegiatan sesuai rencana aksi yang diusulkan PPATK.

Dokumen pertama yaitu Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran serta merta Oleh Pialang Berjangka atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris- DTTOT.

Sedangkan dokumen kedua yakni penilaian risiko tindak pidana pencucian uang- TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor PBK. Dua kebijakan dari Bappebti itu pun telah diundangkan sejak 18 April 2017, lalu.

Menurut Bachrul, dua dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan yang disampaikan Bappebti dalam *Mutual Evaluation Review- MER* pada November 2017 yang dilaksanakan *Asia-Pacific Group on Money Laundering- APG*.

"Jadi, kita sedang mempersiapkan diri sebelum dilakukan review November nanti, apakah Indonesia termasuk negara yang berisiko terhadap TPPU atau tidak. Bila industri PBK diyakini dan terbukti bersih, maka itu menjadi positif bagi peningkatan volume transaksi bursa berjangka," ujarnya.

Implikasi Perppu No. 1 Tahun 2017 dalam industri PBK, dari kacamata Bachrul, adalah memudahkan Dirjen Pajak mengakses dana pemegang saham, perusahaan, dan para nasabah. "Bappebti pun saat ini sedang mempersiapkan peraturan tambahan untuk mendukung pengawasan terhadap perusahaan pialang," kata Bachrul Chairi. 



BBJ Sasar Pasar Kamboja

Bursa Berjangka Jakarta-BBJ dengan Phnom Penh Derivative Exchange- PPDE bersepakat melakukan kerjasama strategis dalam pengembangan teknologi dan transfer pengetahuan.

Kerjasama antar bursa berjangka khususnya yang berasal dari luar negeri menjadi salah satu strategi BBJ untuk mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Dengan kerjasama seperti itu, kontrak berjangka yang diperdagangkan BBJ dapat dipasarkan di bursa luar negeri. Di sisi lain, transfer teknologi sistem perdagangan bursa berjangka diharapkan bisa mendorong volume transaksi.

Terkait itu, pada 15 Mei 2017, lalu, BBJ telah melakukan penandatanganan

perjanjian kerjasama dengan Phnom Penh Derivative Exchange- PPDE. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Utama BBJ, Stephanus Paulus Lumintang dan *Chief Executive Officer* PPDE, Matt Yang. Acara itu juga disaksikan oleh *Director General* (Dirjen) *Security and Exchange Commission of Cambodia*- SECC, Kamboja, Sou Cheat, Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, Komisararis BBJ, Ardiansyah Parman, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Tris Sudarto, Direktur BBJ, Donny Raymond dan sejumlah pengurus perusahaan pialang berjangka anggota BBJ.

Sebagai gambaran, PPDE merupakan bursa terbesar kedua di Kamboja setelah *Cambodia Securities Exchange*- CSX. Bursa ini juga telah memperoleh *lisensi derivative* selaku "*Central Counter Party*" dari SECC. Dengan status lisensi seperti ini, PPDE merupakan *partner* yang baik bagi BBJ dalam ranah perdagangan dan

investasi di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, PPDE menawarkan bagi para nasabahnya suatu *electronic trading service platform* yang stabil, aman, canggih dan dapat diandalkan. Dalam ranah teknologi informasi, ada dua fokus pengembangan yang diprioritaskan PPDE. Pertama, *utilisasi software/hardware* secara optimal untuk memastikan eksekusi order secara instan dan aman. Kedua, pengembangan *matching engine* untuk proses kliring dan *settlement* di antara *liquidity providers*.

Di samping itu, dalam pengembangan kegiatan usahanya, setiap kerjasama yang dibentuk oleh PPDE sangat menekankan aspek *trust and transparency*.

Dalam kerjasama tersebut, BBJ maupun PPDE, berharap dapat mewujudkan target kerjasama yang fokus pada dua hal. Yaitu pengembangan teknologi informasi, dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan.

Direktur Utama JFX, Stephanus Paulus Lumintang, mengatakan, secara umum

kedua pihak berharap dapat bersinergi optimal dalam upaya pengembangan industri PBK di tingkat kawasan Asia Tenggara. “Penandatanganan kerjasama antara BBJ dengan PPDE baru langkah awal. Setelah ini akan ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal teknis, karena di PPDE juga harus ada izin dari SECC, sedangkan BBJ harus ada izin dari Bappebti,” ujar Paulus.

Dia menambahkan, saat ini kerjasama masih terbatas hanya untuk menjembatani investor di kedua negara untuk melakukan transaksi produk bursa berjangka, baik itu di BBJ maupun PPDE.

“Investor yang ada di Kamboja menggunakan *broker* dari PPDE akan bisa melakukan transaksi di kontrak yang ada di BBJ melalui perusahaan pialang berjangka anggota BBJ,” ujarnya. “Tidak menutup kemungkinan juga bahwa investor Indonesia bisa membeli kontrak berjangka yang ada di PPDE. Artinya semua kontrak yang ada di PPDE bisa ditawarkan kepada investor di Indonesia,” sambung Paulus.

Adapun beberapa kontrak berjangka komoditi yang menjadi unggulan di BBJ adalah kontrak berjangka minyak goreng-olein, kopi, kakao, serta emas. Sementara di PPDE, kontrak berjangka yang menjadi unggulan dan diminati masyarakat yakni kontrak berjangka oil- minyak, emas, dan perak.

Menurut Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, kerjasama BBJ dengan PPDE merupakan langkah strategis untuk mengembangkan bursa berjangka di dalam negeri. Harapannya, investor asing akan semakin banyak masuk ke perdagangan berjangka di dalam negeri. Apalagi, impor minyak goreng Kamboja dari Indonesia terbilang cukup tinggi.

“Kamboja juga memiliki hubungan baik dengan China sehingga diharapkan dapat menjadi jalan masuknya investor China ke Indonesia,” imbuh Bachrul.

Bachrul Chairi, mengatakan, pasca penandatanganan kerjasama tersebut, Bappebti akan menunggu proposal dari BBJ untuk kemudian mengeluarkan izin



perdagangan subjek kontrak berjangka bagi masyarakat Kamboja yang menjadi nasabah di PPDE.

“Subjek kontrak berjangka yang ditawarkan ke PPDE bisa dalam bentuk kontrak berjangka multilateral maupun bilateral. Tetapi kami berharap yang lebih ditonjolkan adalah kontrak berjangka multilateral, karena kita ingin BBJ menjadi acuan harga komoditi baik di dalam negeri maupun di Kamboja,” terang Bachrul Chairi.

Rujukan

Industri PBK di Indonesia ternyata cukup terpadang di mata internasional. Satu bukti, Chief Executive Officer PPDE, Matt Yang, mengatakan, selama ini pihaknya menjadikan BBJ sebagai salah satu kiblat bursa derivatif.

“Kami banyak belajar dari BBJ dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dalam pengelolaan bursa berjangka di Kamboja,” ucap Matt Yang.

Memang tak bisa dipungkiri, usia BBJ jauh lebih tua dibandingkan dengan PPDE. Usia PPDE terbilang belia karena baru beroperasi pada Agustus 2016 dengan volume transaksi sekitar 10.000-15.000 lot per bulan. Sedangkan, BBJ telah beroperasi sejak tahun 2000 dengan transaksi multilateral mencapai lebih dari 70.000 lot per bulan.

Matt Yang, menambahkan, produk-produk yang ada di BBJ juga cukup menarik bagi investor di Kamboja, dan sebagian profil dari nasabah juga berbisnis

atau bertransaksi di bursa berjangka China. “Demikian juga sebaliknya, sejumlah investor dari China juga sudah bertransaksi di PPDE,” kata Matt Yang.

Senada dengan itu, Dirjen SECC, Sou Cheat, mengatakan, selama ini BBJ, KBI, dan Bappebti menjadi salah satu rujukan pengaturan bursa berjangka di Kamboja. “Interaksi SECC dengan stakeholder bursa berjangka di Indonesia sudah dimulai pada 2014 lalu,” terangnya.

Sou Cheat, menambahkan, berbeda dengan Indonesia, saat ini di Kamboja berlaku *Central Counter Party*, yakni lembaga kliring yang terpusat di satu badan pemerintahan. Kini, SECC membawahi empat bursa derivatif, dan salah satunya adalah PPDE.

Di samping itu, Sou Cheat, mengakui, produk-produk yang diperdagangkan di bursa Kamboja belum sebanyak di BBJ. “Oleh karena itu, adanya kerjasama kedua bursa akan memberi kesempatan untuk mengembangkan masing-masing bursa berjangka.”

Kamboja juga merupakan negara agrikultur, sama seperti Indonesia. Hal ini membuka peluang adanya komoditas-komoditas baru yang dapat diperdagangkan di dalam industri PBK. “Kami berharap MoU bisa terealisasi dalam bentuk riil. Kami juga akan mendirikan lembaga kliring untuk mendukung perdagangan berjangka yang lebih semarak setelah adanya kerja sama ini,” tandas Sou Cheat. 

Pemprov Babel Bakal Jajal SRG Lada

Muntok White Pepper, gelar itu sudah melegenda sejak ratusan tahun lalu di kalangan taipan mancanegara. Namun kini petani lada di sentra produksi Bangka Belitung- Babel belum juga berdaulat, karena harganya tak kunjung memberi kesejahteraan dan kemakmuran. Pemprov Babel pun berencana dan menggodok komoditi lada sebagai subjek Sistem Resi Gudang- SRG.

Komoditi lada sebagai subjek SRG seperti ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2016, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan baik pemerintah daerah maupun petani produsen untuk stabilisasi harga komoditi. Dari ketentuan Menteri Perdagangan itu, ada sebanyak 14 komoditas yang dapat diresigudangkan, yakni komoditi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra dan timah.

Menyambut kebijakan pemerintah itu, Pemprov Babel mulai ambil ancat-ancang untuk menjadikan komoditi lada sebagai subjek SRG. Niat Pemprov Babel itu diharapkan dapat mempertahankan gelar *Muntok White Pepper* yang telah melegenda di seantero dunia. Di sisi lain, SRG lada dapat meningkatkan luas dan produktivitas tanaman lada yang pada akhirnya mensejahterakan petani.

Sebagai gambaran, Sistem Resi Gudang pada dasarnya merupakan instrumen tunda jual dari sebuah komoditas yang dapat disimpan lebih dahulu di gudang saat panen raya yang biasanya harga mengalami penurunan. Dan selanjutnya dijual ketika harga tinggi. Dengan sistem itu, petani akan mendapatkan harga jual yang lebih baik dan juga bisa memperoleh akses kredit secara tepat dengan bunga rendah. Sebab, Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan barang

dapat dijaminkan ke bank sehingga tidak memerlukan lagi jaminan atau *fixed-asset* lainnya seperti tanah, rumah, kendaraan bermotor dan jenis lainnya.

Pemimpin baru Pemprov Babel, Erzaldi Rosman, agaknya cukup memberi perhatian serius terhadap komoditi lada dan petaninya. Dia mengharapkan di tahun 2017 ini sudah ada tindakan nyata implementasi SRG Laga. Dalam keterangan Erzaldi Rosman kepada media baru-baru ini, mengatakan, Pemprov Babel akan membangun gudang SRG khusus untuk lada putih, sebagai upaya menaikkan harga komoditas ekspor itu sehingga petani lebih bergairah mengembangkan usaha perkebunannya. "Mudah-mudahan di tahun 2017 ini, pembangunan gudang SRG lada putih sudah bisa terealisasi," katanya.

Menurut Erzaldi Rosman, pembangunan gudang SRG ini akan membantu petani, karena mereka tidak lagi terpaksa menjual hasil panen lada dengan harga murah kepada tengkulak. "Selama ini petani terpaksa menjual lada putih kepada tengkulak, karena keterbatasan tempat penyimpanan hasil panen," ujar Erzaldi. Lebih jauh dikatakan, gudang SRG dapat menyimpan lada para petani yang siap dipasarkan dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan, dan mereka dapat menjual hasil panen jika harga lada putih dunia mengalami



kenaikan. Selain itu, dengan adanya Resi Gudang dapat meningkatkan kualitas lada putih sehingga hasil panen lada petani di daerah itu makin diminati pasar dunia.

"Saat ini permintaan lada putih di pasar dunia cukup tinggi. Sebab lada yang dihasilkan dari Babel memiliki cita rasa dan aroma khas," ujar Erzaldi.

Menurut Erzaldi Rosman, skema SRG sangat strategis karena dapat memperkuat daya tawar petani serta menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, di mana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga naik. Dengan demikian, langkah itu dapat memotivasi petani mengembangkan usaha perkebunannya.

"Mudah-mudahan dengan SRG dapat



meningkatkan hasil panen petani, sehingga kita dapat memenuhi permintaan pasar dunia yang tinggi,” kata Erzaldi.

Erzaldi Rosman juga berharap petani lada putih mendukung kebijakan dan pembangunan gudang SRG, agar pemerintah dapat dengan mudah mengembalikan kejayaan lada putih Babel atau lebih dikenal di pasar dunia dengan gelar “Muntok White Pepper”.

Kajian Lada

Dari kajian yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan judul “Analisis Implementasi SRG Komoditi Lada”, diketahui Indonesia merupakan penghasil lada terbesar di dunia dengan pasokan sekitar 80 %. Lada banyak dihasilkan di

Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dengan sentra produksi terbesar di Provinsi Babel dengan lada putihnya, dan Provinsi Lampung dengan lada hitamnya.

Dari sisi harga, kajian itu menulis, perkembangan harga lada di Provinsi Babel selalu berfluktuasi dengan pola yang tidak menentu sebagaimana pola fluktuasi pada harga tanaman pangan/padi. Sedangkan fluktuasi harga komoditi lada tidak terpola, sehingga pada saat musim panen belum tentu harganya menurun.

Musim panen lada biasanya terjadi di bulan Juli sampai dengan September. Logikanya pada periode tersebut harga lada akan menurun secara signifikan, namun yang terjadi harga lada justru meningkat pada tahun 2011 dan pada

tahun 2012 relatif stabil. Sementara itu pada tahun 2013 pada saat musim panen harga menunjukkan sedikit penurunan.

Fluktuasi harga lada relatif sulit diprediksi karena sebagian besar hasil produksi lada Indonesia (lebih dari 50 %) di ekspor, sehingga harga di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh harga lada di pasar internasional. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara penghasil lada di dunia, akan tetapi banyak negara lainnya yang menghasilkan lada seperti China, Vietnam, Brazil dan Malaysia.

Di sisi lain, petani lada di Babel memiliki budaya untuk tidak langsung menjual hasil panennya. Pada saat panen dan harganya tidak menarik, mereka cenderung menyimpan produknya dan mereka akan menjual produk yang disimpan jika harganya sudah meningkat.

Berdasarkan perkembangan harga bulanan selama tiga tahun (2011, 2012 dan 2013), tercatat bahwa harga lada dari bulan Januari sampai dengan Desember selalu berfluktuasi atau naik turun. Namun demikian, khusus pada bulan Juli selama tiga tahun tersebut selalu mengalami penurunan dan meningkat kembali pada 1 atau 2 bulan berikutnya dengan selisih harga (kenaikan dengan penurunan harga) Rp 49.000 per kg sampai dengan Rp 10.241 per kg.

Penurunan harga yang terpola tersebut (terjadi sepanjang tahun pada bulan Juli) merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan petani untuk memanfaatkan program SRG.

“Berdasarkan analisis kesiapan dari sisi komoditi maka komoditi lada dinyatakan siap untuk diimplementasikan untuk resi gudang di Indonesia. Selain fluktuasi harga yang tinggi untuk periode 8 – 10 tahunan, komoditi lada Indonesia yang sebagian besar diekspor membutuhkan resi gudang untuk memberikan modal kerja kepada petani karena lada baru dapat dipanen setelah 2-3 tahun dan hanya mengalami panen raya selama satu kali yaitu pada bulan Juli – September setiap tahunnya,” tulis kajian yang dirilis tahun 2014 lalu. 📖

Bappebti dan Aspebtindo Gelar 12 Titik Pasar Murah Ramadhan

Pelaku industri perdagangan berjangka komoditi- PBK yang tergabung di Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo ikut berpartisipasi dalam kegiatan pasar murah yang menjadi program Kementerian Perdagangan. Selama bulan ramadhan, lalu, ada sebanyak 12 titik pasar murah yang digelar di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.



Pondok Pesantren setempat.

Bappebti yang merupakan unit Eselon I Kementerian Perdagangan, dalam melaksanakan program tersebut menggandeng Aspebtindo. Direktur Eksekutif Aspebtindo, Chrisnawan Triwahyuardhianto, menjelaskan, Aspebtindo merupakan binaan Bappebti yang mendapatkan himbauan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pasar murah ramadhan. Caranya yaitu dengan menyisihkan sebagian dana corporate social responsibility- CSR dari para pelaku usaha PBK.

Alhasil, Aspebtindo yang beranggotakan bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang dan pedagang berjangka, serta bank penyimpan margin bersama Bappebti berhasil menggelar 12 titik pasar sembako murah, yang terdiri dari tujuh titik di Pulau Kalimantan dan lima di Pulau Sulawesi.

"Alhamdulillah, dalam waktu sepekan dapat terkumpul dana untuk membiayai 12 titik pasar murah. Satu titiknya kami siapkan 500 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, susu kental manis, mentega, kecap manis, sirup dan mie instan," kata Chrisnawan.

Satu paket sembako tersebut senilai Rp 100 ribu, dan dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 50 ribu. Adapun pembelian sembako murah ini melalui sistem kupon yg dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian, hasil penjualan sembako

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perdagangan menggelar pasar murah di berbagai penjuru tanah air. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di bulan

puasa dan menjelang Lebaran.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya industri dan perusahaan swasta. Sedangkan untuk pelaksanaannya, menggandeng berbagai



Sekretaris Bappebti, Nusa Eka, saat menyerahkan sembako murah di Ponpes Nurul Jannah, Kota Banjarmasin.

disumbangkan kembali pada Pondok Pesantren yang menjadi tempat dilaksanankan pasar murah.

Lebih jauh dijelaskan Chrisnawan, ada tujuh Pondok Pesantren yang dipilih menjadi tempat diselenggarakannya kegiatan pasar murah Ramadhan di pulau Kalimantan. Diantaranya, wilayah Kalimantan Utara, diselenggarakan di Pondok Pesantren Uhyatul Muallimin dan Pondok Pesantren Hidayatullah di Kota Tarakan pada 9 Juni 2017.

Lalu, wilayah Kalimantan Selatan, diselenggarakan di Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Kota Banjar Baru, dan Pondok Pesantren Hidayatullah di Kabupaten Banjar pada 12 Juni 2017, serta Pondok Pesantren Nurul Jannah di Kota Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 2017.

Selanjutnya, wilayah Kalimantan Tengah, diselenggarakan di Pondok Pesantren Fajar Islam, Kota Kuala Kapuas pada tanggal 14 Juni 2017. Dan, wilayah Kalimantan Timur, diselenggarakan di Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Balikpapan pada tanggal 14 Juni 2017.

Sedangkan, di Sulawesi ada lima pondok pesantren yang dipilih menjadi tempat diselenggarakannya kegiatan

pasar murah Ramadhan. Diantaranya, wilayah Gorontalo diselenggarakan di Yayasan Sabrun Jamil, Kec Bone Bolango pada 15 Juni 2017 dan Pondok Pesantren Hubulo, Kec. Tapa pada 16 Juni 2017.

Lainnya, di wilayah Gorontalo

diselenggarakan di Yayasan Al Ma'arif MTS. Nurut Taqwa Kec. Kayubulan Limboto pada 16 Juni 2017; dan Pondok Pesantren Kyai Modjo Kec. Limboto Barat pada 18 Juni 2017. Lalu, wilayah Sulawesi Selatan diselenggarakan di Majelis Taklim Kec. Kamanre, Kab. Luwu pada 20 Juni 2017.

Terkait itu, Sekretaris Bappebti, Nusa Eka, mengatakan, kegiatan pasar murah bertujuan meringankan beban masyarakat miskin sekaligus berdonasi terhadap Pondok Pesantren. "Pasar murah ini bukan "bagi-bagi sembako" karena warga harus tetap membeli. Karena, dari penjualan yang Rp 50.000 tersebut akan disumbangkan kembali ke pesantren.

"Sehingga, lewat pasar murah ini ada dua tujuan tercapai, menyediakan bahan pokok dengan harga sangat terjangkau dan sumbangan untuk pemberdayaan pesantren," tutur Nusa Eka.

Lebih jauh dikatakan Nusa Eka, kegiatan pasar murah Ramadhan juga digunakan jajaran Eselon I Kementerian Perdagangan untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di kabupaten/kota tempat pasar murah diadakan. 



Suasana Pasar Murah di Pondok Pesantren Fajar Islam, Kota Kuala Kapuas.



Irjen Kemendag Kunjungi Kantor Bappebti

Inspektur Jenderal Kemendag, Srie Agustina melakukan kunjungan ke Kantor Bappebti, Jakarta, Jum'at (2/6). Irjen Srie diterima oleh Kepala Bappebti, Bachrul Chairi beserta Pejabat Eselon II Bappebti.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Srie mengunjungi UPTP II dalam rangka monitoring proses perizinan *online* yang ada di Bappebti, selain itu juga membuka secara resmi kegiatan pemeriksaan tim Inspektorat Jenderal di Bappebti. 📷



DPRD Kabupaten Bangka Barat Bahas Masalah Lada ke Bappebti



Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Retno Rukmawati didampingi Pejabat Eselon III Bappebti menerima kunjungan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Zalpian Zainudin beserta jajarannya, di kantor Bappebti, Kamis (8/06).

Kunjungan ini membahas mengenai kebijakan untuk kestabilan harga lada di Kab Bangka Barat. Komoditi lada merupakan tumpuan penghasilan bagi sebagian masyarakat Kab. Bangka Barat yang saat ini harganya dipasaran selalu berfluktuatif. Dan terkadang harga di pasar internasional mengalami kenaikan, namun tidak diikuti di daerah, sehingga daerah tidak menikmati kenaikan harga tersebut. 📷

Kunjungan Kerja DPRD Kab. Bungo ke Bappebti

Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Retno Rukmawati didampingi Pejabat Eselon III Bappebti menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bungo, di kantor Bappebti, Jumat (9/06).

Tujuan dari kunjungan tersebut adalah konsultasi terkait persyaratan penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Karet dalam kaitannya dengan Perda Pasar Lelang Komoditas Karet yang sedang disusun oleh DPRD Kab. Bungo. 📷



Sosialisasi Sistem Perdagangan GKR Melalui Pasar Lelang



Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Dharmayugo Hermansyah menghadiri Sosialisasi Sistem Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang yang diselenggarakan oleh PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) di Jakarta, Senin (05/06).

Acara ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Bappebti sebelumnya, yakni untuk menyosialisasikan Permendag No.16/M-DAG/PER/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas dan penetapan PT. Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) sebagai penyelenggara pasar lelang GKR.

Dalam kesempatan tersebut PT PKJ selaku penyelenggara pasar lelang menjelaskan mengenai tata cara dan juga melakukan simulasi untuk melakukan transaksi. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan ASRIM, AROBIM, Perbankan serta Pelaku Usaha lainnya. 📷

PPh Final Rendah Bakal Dorong Transaksi Multilateral

Rencana penurunan Pajak Penghasilan- PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka diperkirakan akan berdampak positif bagi industri perdagangan berjangka komoditi- PBK di Indonesia. Sementara itu, dari sisi pelaku pasar berharap untuk meningkatkan volume transaksi sebaiknya industri PBK dibebaskan dari PPh.

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi mengatakan penurunan nilai pajak bisa menjadi pemicu yang ampuh untuk menarik minat calon investor. "Saat ini Kementerian Keuangan sudah memberikan pilihan besaran PPh yang nantinya berlaku di industri PBK," katanya.

"Kita saat ini masih mempertimbangkan posisi nilai yang akan diambil, dan Bappebti masih membicarakan dengan pelaku usaha terkait besaran PPh final, sekaligus menyesuaikannya dengan situasi perkembangan industri PBK terkini," terang Bachrul Chairi, kepada media baru-baru ini.

Di lain pihak, Dirut Bursa Berjangka Jakarta- BBJ, Stephanus Paulus Lumintang, mengatakan, PPh yang saat ini dikenakan terhadap investor cukup memberatkan. Oleh karena itu, dengan nilai pajak yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi PBK, khususnya kontrak multilateral.

"PPh yang berlaku sekarang sangat memberatkan investor. Kita sendiri sudah mengusulkan nilai PPh final nantinya sebesar



0,1 % untuk transaksi multilateral dan bilateral," ujar Paulus.

Menurut Paulus, bila ingin memacu transaksi PBK idealnya pengenaan PPh ditiadakan atau diberlakukan 0 %. Setelah volume meningkat signifikan, dalam 2-3 tahun ke depan baru investor diwajibkan membayar pajak. "Kondisi tersebut mengacu kepada bursa berjangka di Singapura dan Malaysia yang memberlakukan pajak 0 %. Alhasil banyak investor mancanegara, termasuk dari Indonesia, yang berinvestasi di sana," katanya.

"Setahu saya di Singapura dan Malaysia tidak kena pajak, makanya transaksi bisa ramai. Bahkan di Malaysia investor terbesar berasal dari Indonesia," terang Stephanus Paulus Lumintang. 📌

BKDI & ICH Gencar Promosi Gratis Member Terbaik

Sejak awal tahun 2017, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI dan Indonesia Clearing House- ICH gencar melakukan promosi gratis atas prestasi perusahaan pialang yang berhasil menciptakan likuiditas tertinggi di setiap bulannya. Promosi itu dilakukan dan ditayangkan di seluruh jaringan *office building* kerjasama PT Alternative Media Group- AMG yang tersebar di Kota Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Menurut *Vice President of Business Development* BKDI, Stella Lukman, program promosi gratis itu dilakukan untuk memberi motivasi terhadap member BKDI yang berhasil menciptakan likuiditas tertinggi. "Di sisi lain, diharapkan dapat meningkatkan *image* industri PBK," papar Stella Lukman, di

acara ramah tamah antara BKDI - ICH dengan anggota pialang dan pedagang berjangka, di Jakarta, (31/5).

Hadir dalam acara itu antara lain, Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, Presiden Direktur BKDI, Lamon Rutten, Ketum Aspebtindo, F. Wisnubroto, serta perwakilan dari pialang dan pedagang berjangka yang menjadi anggota BKDI.

Lebih jauh diungkapkan Stella Lukman, setiap bulan BKDI merilis daftar lima perusahaan terbaik berdasarkan jumlah volume transaksi terbesar. Di bulan April 2017, lalu, lima perusahaan terbaik yakni PT Monex Investindo Futures, PT Millenium Penata Futures, PT Victory International Futures, PT Topgrowth Futures, dan PT Midtou Aryacom Futures. 📌

BBJ Aktif Mengedukasi Melalui FTLC

Pelaku usaha industri perdagangan berjangka komoditi-PBK senantiasa aktif mengedukasi dan sosialisasi masyarakat khususnya pada kalangan akademisi. Sebagai contoh, Bursa Berjangka Jakarta- BBJ dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) serta Agrodana Futures- AGF melakukan kegiatan edukasi di *Futures Trading Learning Center- FTLC* di Kampus Politeknik Negeri Bandung- Polban, Senin (22/5). FTLC merupakan wadah kerjasama edukasi antara industri, kampus dan *Self Regulatory Organization- SRO* yang berperan menyediakan edukasi perihal industri PBK bagi sivitas akademika.

Kegiatan edukasi yang berlangsung di FTLC Polban dilakukan konsisten dalam bentuk seminar, *workshop*, edukasi praktis baik oleh pialang maupun SRO. Selain itu ada juga simulasi trading multilateral berbentuk kompetisi bagi para sivitas akademika kampus Polban.

Dirut BBJ, Stephanus Paulus Lumintang, dalam sambutannya mengatakan perihal signifikansi eksistensi industri PBK dalam perekonomian Indonesia dan pembangunan ekonomi nasional. Dia juga secara khusus menjelaskan perihal pentingnya bekal pengetahuan bisnis praktis di usia dini sejak duduk di bangku kuliah.

Sebagai informasi, hingga akhir 2017 BBJ dan KBI menargetkan pembukaan FTLC di sejumlah kampus mencapai 22 lokasi. Saat ini, FTLC yang sudah berdiri ada sebanyak 19 yang tersebar di seluruh Indonesia. Belum lama, 18 Mei 2017, lalu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama FTLC dengan Univ. Kristen Indonesia- UKI Jakarta, antara Fak. Ekonomi UKI, PT Kresna Investa Futures, BBJ dan PT KBI. Sebelumnya, pada 9 Mei 2017, lalu, juga dilakukan MoU dengan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Tanjungpura, Pontianak - Kalbar. 

Bappebti Tingkatkan Sinergitas Berantas Pelanggaran PBK

Bappebti bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan aparat penegak hukum Kota Surakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi- Rakor Penanganan Kasus Hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, di Surakarta, pada 8 Juni 2017, lalu. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan sinergitas penanganan kasus hukum bidang PBK, baik yang legal maupun ilegal.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati, dalam sambutannya mengatakan, Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi di antara semua aparat penegak hukum, serta menyusun langkah-langkah konkret penanganan kasus pelanggaran ketentuan di bidang perdagangan berjangka yang tidak memiliki izin, maupun yang memiliki izin dari Bappebti.

"Pelanggaran masih banyak dilakukan oleh pihak yang menyelenggarakan kegiatan layaknya PBK, namun tidak memiliki izin dari Bappebti. Bentuknya dapat berupa seminar atau *workshop forex*, umumnya kegiatan itu dilakukan diberbagai hotel berbintang," jelas Sri Hariyati.

Seminar atau *workshop* seperti itu diduga telah



melanggar Pasal 49 ayat (1a) jo. Pasal 73D ayat (1) UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah oleh UU No. 10 Tahun 2011, dengan ancaman pidana 5-10 tahun dan/atau denda Rp 10-20 miliar. "Investasi di bidang PBK memiliki sifat *high risk high return* dan penuh risiko. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih jeli dan teliti apabila mau berinvestasi dan memilih perusahaan pialang yang telah memiliki izin dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini Bappebti," tegas Sri Hariyati. 

Harga Lada Anjlok, Pemprov Babel Datangkan Pembeli Mancanegara

Harga lada di Provinsi Bangka Belitung- Babel saat ini hanya sekitar Rp 60.000 - Rp 80.000 per kg. Dengan kisaran harga lada seperti itu, menjadi permasalahan yang rumit bagi *stakeholder* dan terutama petani. Demikian antara lain dikatakan Kepala Bidang Perkebunan Kab. Bangka, Subhan. "Jika dilihat dari analisa usaha tani, dengan harga lada sekarang ini memang tidak mengalami keuntungan sebab biaya produksi sangat tinggi. Sehingga merugikan petani," katanya.

"Kita mengharapkan petani bisa menyimpan hasil panen lada, dengan harapan di masa mendatang harga bergerak naik. Namun, dalam kondisi seperti sekarang di musim kering, suasana Ramadan dan akan Idul Fitri, tentu masyarakat perlu uang dan terpaksa menjual lada dengan harga rendah," terang Subhan.

Melihat fenomena harga lada yang anjlok itu, Pemprov Babel berencana mendatangkan pembeli langsung dari negeri Belanda dan Italia.

"Mereka akan datang ke kita, jika cocok, mereka akan membeli langsung lada putih kita atau *Muntok White Pepper*," jelas Subhan.

Sebab itu Subhan berharap adanya peningkatan produksi lada di Provinsi Babel dengan cara menanam lada sebanyak-banyaknya. Selain itu, Subhan juga menyarankan kepada petani



untuk melakukan perawatan tanaman lada sehingga berproduksi maksimal.

"Budidaya tanaman lada ini perlu dilakukan secara intensif, pemberantasan hama penyakitnya menggunakan agen-agen hayati dengan hama-hama terpadu, sehingga lingkungan aman, produksinya pun meningkat," sebut Subhan. 📌

Pemerintah Moratorium Ekspor Kelapa

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana mengatur ulang tata niaga ekspor kelapa. Moratorium itu ditujukan untuk menahan laju ekspor kelapa sehingga tidak bebas seperti saat ini.

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Oke Nurwan, selama ini ekspor kelapa dalam bentuk buah jumlahnya masih sangat besar. Akibatnya, industri pengguna kelapa kewalahan untuk mendapatkan bahan baku.

"Karena industri di dalam negeri kekurangan, tapi (kelapa buah) di ekspor," jelas Oke, kepada media baru-baru ini.

Untuk itu, kata Oke, pemerintah akan menekan laju ekspor kelapa buah dan mendorong ekspor produk olahan kelapa yang bernilai tambah. "Sebab ekspor kelapa yang bernilai tambah bakal memberi keuntungan lebih bagi petani kelapa," ujar Oke.

Sebagai gambaran, kelapa merupakan salah satu komoditas strategis, terutama untuk ekspor ke negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Namun di sisi lain, ekspor kelapa menghadapi tantangan karena membuat industri dalam negeri kekurangan bahan baku, apalagi produksinya stagnan bahkan cenderung menurun. 📌



Coftra held coordination meeting on Law enforcement for eradicating illegal practice

Upgrading the handling synergy of Futures Trading law case, Coftra had held coordination meeting with *Surakarta* trade service and the law enforcement officers. The intention of that coordination meeting is to synchronise the perception between law enforcement officers and also to compile real steps in handling violation case in futures trading area that has no permit or has no permit from Coftra.

"Up until today there are still lots of violation that were done by the event organizer activity in futures trading, but somehow they don't have permit from Coftra. The activity form can be a forex seminar or workshop that was done in various starred hotel," explained Sri Hariyati, the Chief of Coftra Legislation and Enforcement Bureau during her speech on coordinator meeting of Law case enforcement in futures trading area in Surakarta, Central Java on the 8th of June. The event was attended by the resort police, State prosecutor's office, District court, OJK's office, Immigration area office, Government of communication and information office, government trading office and academic communities in Surakarta.

Moreover Sri Hariyati revealed that the activities were clearly violate clause 49 paragraph (1a), Clause 73D paragraph (1) Law No.32 year 1997 on Commodity futures trading as amended by Law No.10 year 2011 with criminal threat 5-10 years and/or fine 10-20 billion.



Sri Hariyati also added, for those who wants to invest to a company listed in Coftra, they should become a clever investor by checking the legality of the company in Coftra's website. Also by sharply recognizing the vary of investment that they will use whether it has a risk or not and also checking whether the brokers company has separate account to relocate customer's fund.

"For all the people, you should be more aware and are not too easy affected by lure promise of profit and fixed income," Sri Hariyati emphasized. 📌

The GKR auction market cuts distribution chain

Bachrul Chairi, Coftra's Chief, through his decision *PT.Pasar Komoditas Jakarta, Jakarta Commodity market Pty Ltd (PKJ)* as the administrator of Refined crystal sugar auction market through Trading Minister Decree No.684/M-DAG/KEP/5/2017 on The appointment of RCS auction market administration.

"The GKR trading for food and beverages industry in Indonesia nowadays is more simple and can be done directly by industry players start from *IKM/UKM* until bigger industry through the auction market mechanism of commodity," Bachrul explained.

The GKR auction market is an electronic auction market that organizing GKR's online and real time sales transaction by

using the method of Bid and Offer. The volume of seller and buyer are 1 tons, 5 tons and 25 tons.

"This GKR trading arrangement can increase the Business Competitiveness because in that mechanism, *IKM/UKM* group can directly accesing GKR from seller with fixed and transparant price. Therefore by using this GKR auction market it can cut the distribution path," Bachrul explained.

The GKR trading arrangement through auction market, according to Bachrul, will not change the business activity of GKR's users. "The new thing is on the change of how we are doing electronically on the system that was developed so that it can facilitate the distributed GKR supervision," Bachrul Chairi added. 📌



Sujito, Jakarta (46)
08562728xxxx

Tanya;

Kepada Yth Bappebti

Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) di salah satu Perguruan Tinggi di Jakarta. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel tentang perdagangan berjangka komoditi, dan di artikel tersebut terdapat kalimat perdagangan berjangka multilateral dan bilateral. Terkait itu, saya ingin menanyakan apa pengertian dengan perdagangan berjangka multilateral dan bilateral.

Jawaban:

Sebelumnya atas nama Bappebti mengucapkan terima kasih karena anda sebagai mahasiswa FE telah tertarik mengikuti perdagangan berjangka komoditi.

Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2011, tentang perubahan UU No. 32 Tahun 1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, dijelaskan bahwa perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan oleh bursa berjangka terdapat dua jenis yakni perdagangan berjangka multilateral dan bilateral. Yang dimaksud dengan perdagangan berjangka multilateral adalah perdagangan berjangka yang dilakukan oleh banyak pembeli dan penjual anggota bursa berjangka terhadap sebuah subjek atau kontrak berjangka berbasis komoditi (pertanian, perkebunan, tambang, keuangan, dsb).

Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan berjangka bilateral adalah perdagangan berjangka yang dilakukan antara perusahaan pialang berjangka yang menerima amanat dari nasabah dengan perusahaan pedagang berjangka (penyelenggara) terhadap subjek kontrak berjangka komoditi (valuta asing, emas, indeks, dsb).

Terima kasih.

Layanan SMS Center BAPPEBTI

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Glossary

1. Clear

The process by which a clearinghouse maintains records of all trades and settles margin flow on a daily mark-to-market basis for its clearing member.

2. Clearing

The procedure through which the clearing house or association becomes buyer to each seller of a futures contract, and seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract.

3. Clearing Corporation

An independent corporation that settles all trades made at the Jakarta Futures Exchange acting as a guarantor for all trades cleared by it, reconciles all clearing member firm accounts each day to ensure that all gains have been credited and all.

4. Clearing

Margin Financial safeguards to ensure that clearing members (usually companies or corporations) perform on their customers' open futures and options contracts.

5. Clearing Member

A member of the Clearing House or Association. All trades of a non-clearing member must be registered and eventually settled through a clearing member.

6. Clearing Price

See Settlement Price.

7. Clearinghouse

An agency or separate corporation of a futures exchange that is responsible for settling trading accounts, clearing trades, collecting and maintaining margin.

8. Close end Funds

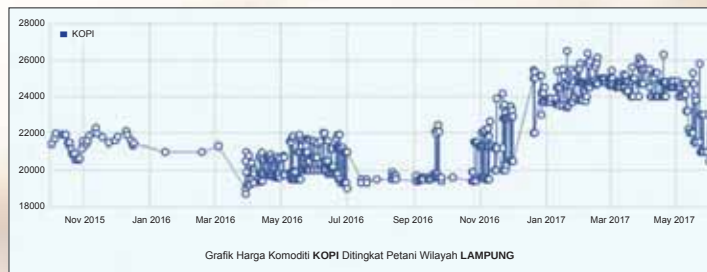
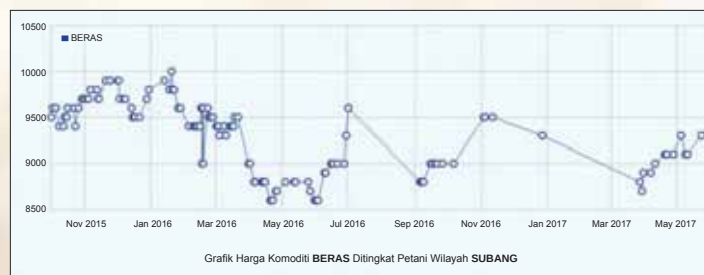
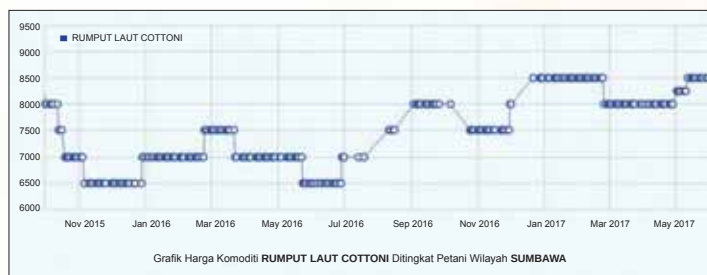
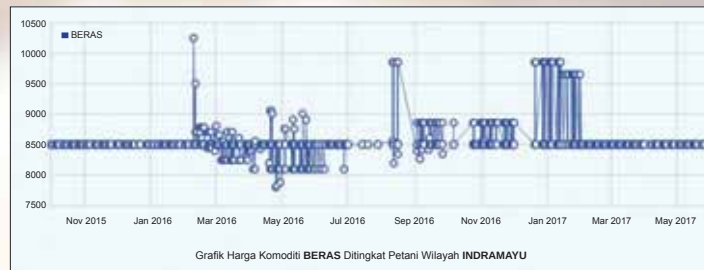
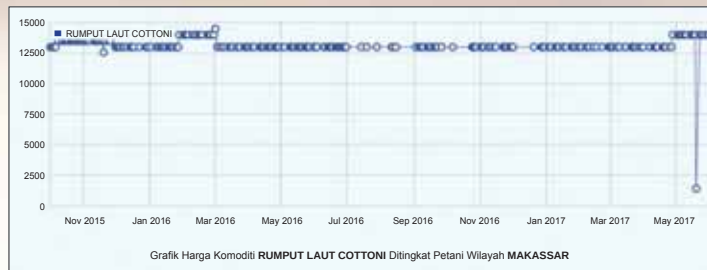
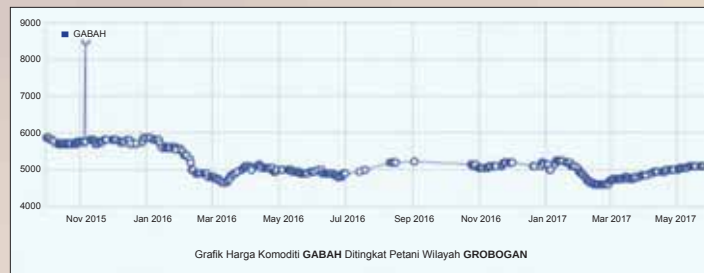
Managed investment which is listed on the stock exchange. The price of its shares will be determined according to demand and supply.

9. Close Out

To trade an equal and opposite futures transaction to that already held. See also offset.

10. Close, The

The period at the end of the trading Session officially designated by the exchange during which all transactions are considered made "at the close".



Sumber : BAPPEBTI
<http://infoharga.bappebti.go.id/>

Informasi Harga Komoditi Melalui SMS

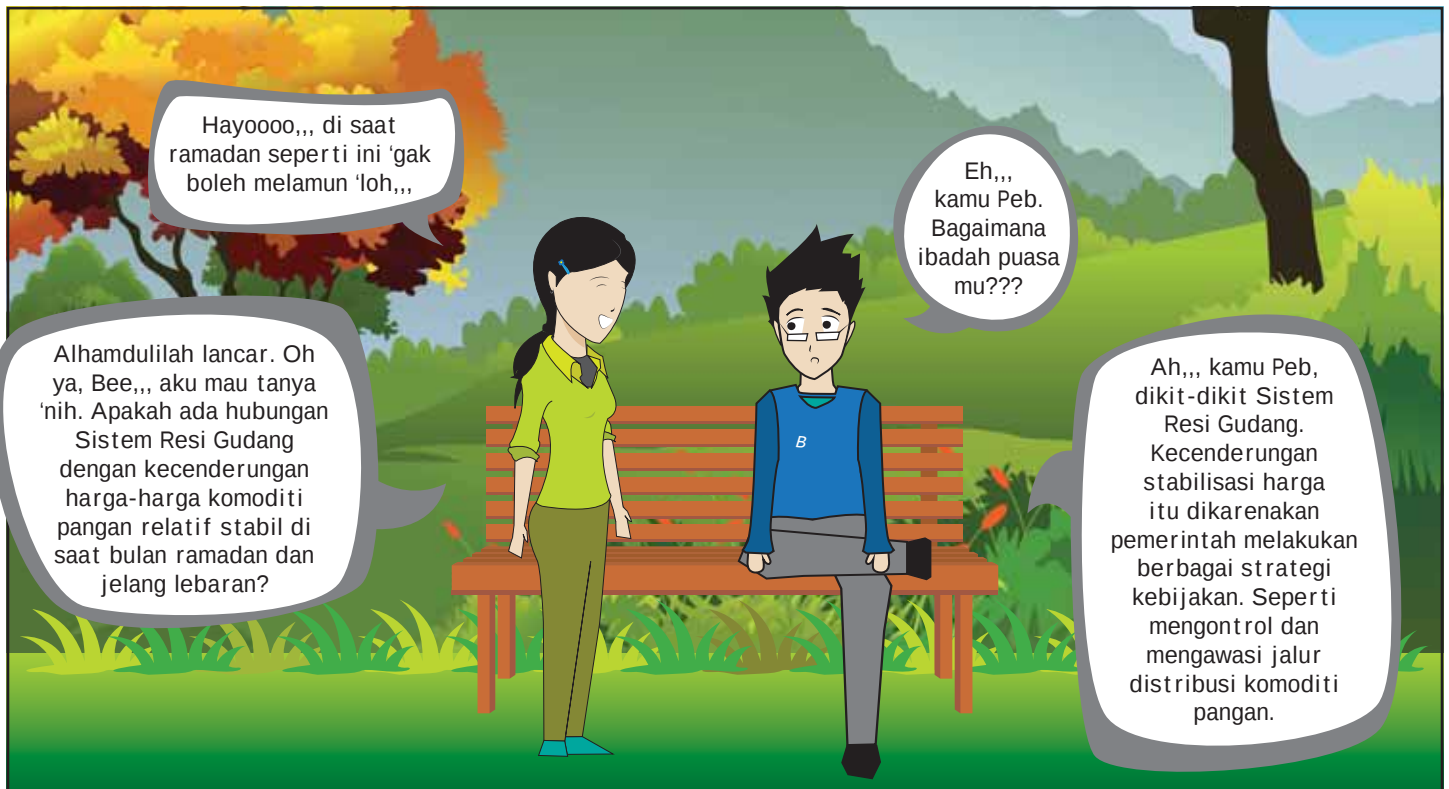
Informasi harga komoditi juga dapat dengan mudah diperoleh dengan mengirim SMS ke SMS Center Info Harga Bappebti.

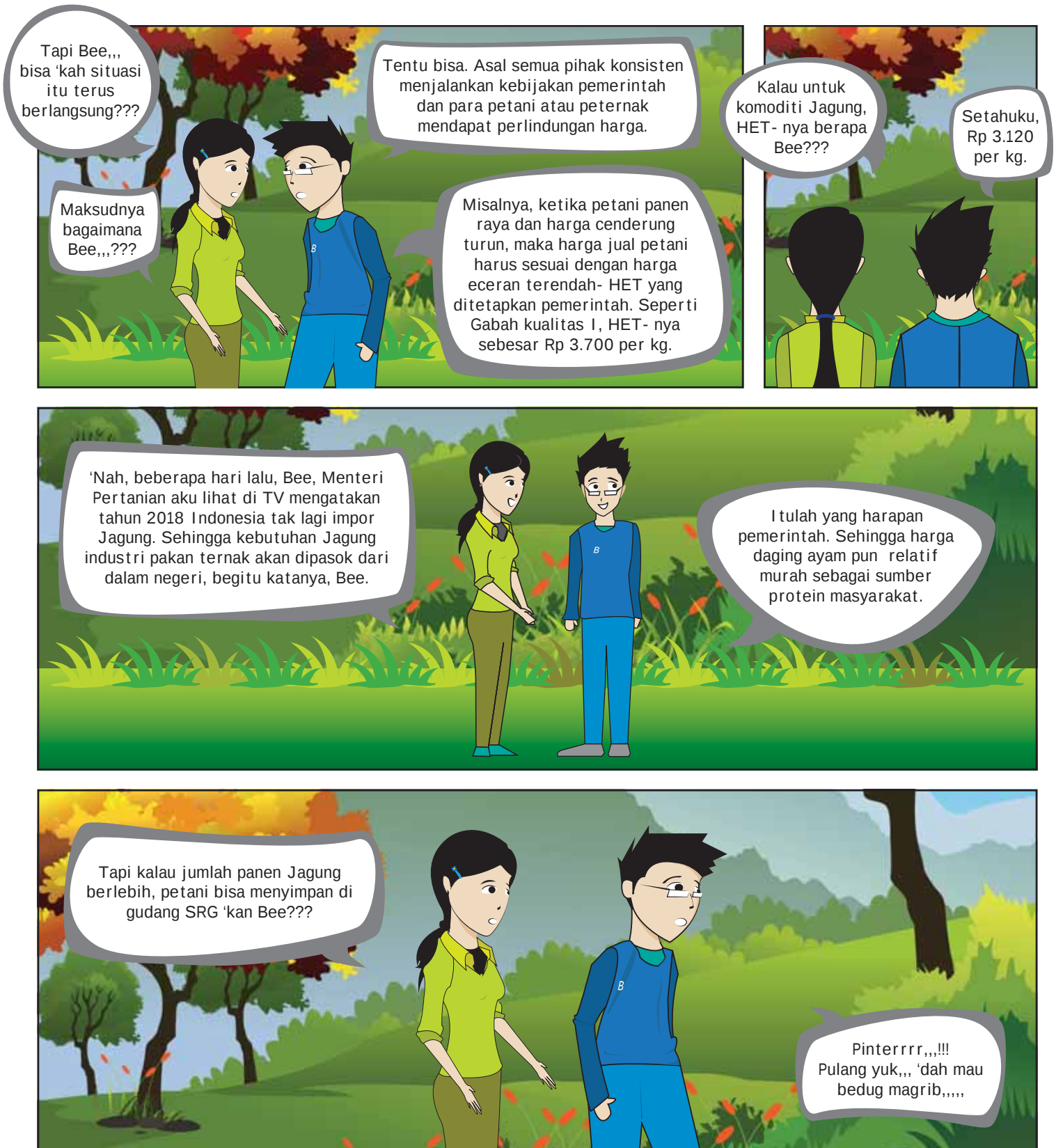
SMS request informasi harga ditulis dengan format
HARGA#[NAMA_KOMODITI]#[NAMA_DAERAH]
 dan dikirim ke nomor

0812 1867 8000

Contoh : HARGA#BERAS#INDRAMAYU

Stabilisasi Harga Jelang Ramadan dan Lebaran





Perdagangan Gula Rafinasi Melalui Pasar Terorganisir

*) IWAN CAHYO SURYADI

Dalam pembangunan industri gula nasional, pemerintah telah menerapkan beberapa instrumen kebijakan yang diarahkan untuk mendorong perkembangan industri gula Indonesia. Kebijakan tersebut mempunyai dimensi cukup luas yang mencakup input, produksi, distribusi, dan harga. Kebijakan yang paling signifikan di antara berbagai kebijakan produksi dan input adalah kebijakan Intensifikasi Tebu Rakyat-TRI yang tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 1975.

Tujuan Inpres tersebut adalah untuk meningkatkan produksi gula nasional dan pendapatan petani tebu. Penerbitan Kebijakan ini sebagai respon atas adanya defisit penyediaan gula semakin besar sebagai akibat konsumsi gula yang terus meningkat, karena perekonomian nasional tumbuh cukup pesat yang disertai dengan peningkatan jumlah penduduk.

Bersamaan dengan itu, harga gula di pasar internasional melambung tinggi. Esensi dari kebijakan tersebut adalah membuat petani menjadi manajer pada lahannya sendiri dengan dukungan pemerintah melalui kredit Bimas, bimbingan teknis, perbaikan sistem pemasaran dengan melibatkan Koperasi Unit Desa- KUD untuk menciptakan hubungan kerjasama antara petani tebu dan pabrik gula.

Periode awal tahun 1990-an, kinerja pergulaan nasional terus menurun, baik dari segi areal, produktivitas maupun produksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 1997, yang bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi dan peran tebu rakyat, perusahaan perkebunan, dan koperasi dalam pengembangan industri gula. Inpres tersebut juga mempertegas peran Menteri Pertanian dalam pengembangan industri gula, baik melalui penyediaan bibit dan bimbingan teknis, peningkatan peran lembaga penelitian maupun menghilangkan berbagai pungutan yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan tebu rakyat. Namun Inpres tersebut dicabut dengan Inpres No 5 Tahun 1998 yang membebaskan petani menanam komoditas yang paling menguntungkan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1996.

Kebijakan produksi yang cukup signifikan pada tahun 2003/2004 adalah pengembangan program akselerasi peningkatan produksi dan produktivitas gula nasional. Pemerintah mencanangkan tercapainya swasembada gula pada tahun 2007 dengan produksi tiga juta ton dan produktivitas rata-rata 8,0 ton gula per ha. Esensi program ini diarahkan pada kegiatan pokok pembongkaran tanaman ratoon dengan penggunaan varietas tebu unggul baru dan penyediaan bibit bermutu. Pada tahap awal, sasaran stimulasi diarahkan untuk petani tebu rakyat di Pulau Jawa, di mana pada tahun 2003 diberikan bantuan rehabilitasi tanaman ratoon seluas 17.360 ha dengan pembuatan kebun bibit seluas 3.818 ha.

Sementara itu, untuk mengamankan harga gula dalam negeri dan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani tebu dari serbuan gula impor yang cenderung melebihi pasokan kebutuhan gula baik untuk keperluan bahan baku industri maupun konsumsi dalam negeri, maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menetapkan beberapa kebijakan tata niaga gula.

Konsumen Gula

Keluarnya berbagai kebijakan pemerintah tersebut dilatarbelakangi segmentasi pasar di dalam negeri yang terbagi dua. Yakni, *pertama*, Gula Kristal Putih- GKP, untuk kebutuhan konsumsi, dengan sistem distribusi yang terbuka, perkiraan kebutuhan berkisar 2,95 juta ton per tahun, yang terdiri konsumsi rumah tangga sekitar 6,41 kg per kapita atau setara 1,66 juta ton per tahun dan kebutuhan konsumsi Horeka sekitar 3,34 kg per kapita atau setara 864 ribu ton per tahun. (*Asumsi jumlah penduduk 2016: 258.705.000. data Bappenas*).

Kedua, segmentasi pasar gula di dalam negeri yakni Gula Kristal Rafinasi- GKR. Untuk jenis GKR ini adalah kebutuhan industri, oleh sebab itu sistem distribusinya tertutup. Namun, dampaknya industri makanan dan minuman- Mamin skala menengah dan kecil akan terkendala dalam memperoleh GKR. Sebab, ciri industri Mamin untuk pembelian bahan baku cenderung dalam jumlah tonase kecil. Hal ini berdampak industri Mamin tidak memiliki akses langsung ke produsen GKR.

Mengatasi kesulitan industri Mamin memperoleh GKR, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 74 Tahun 2015. Kebijakan ini mewajibkan penyaluran GKR langsung kepada industri pengguna tanpa melalui rantai distributor, khusus untuk industri kecil menengah- IKM dapat diberikan oleh produsen GKR kepada Distributor dengan rekomendasi Kementerian Perindustrian dan atau Kementerian koperasi UKM.

Perkiraan kebutuhan GKR di dalam negeri mencapai 3,03 juta ton per tahun (setara RS 3,22 juta ton), yang terdiri dari industri besar dan menengah sekitar 2,59 juta ton. Dan, industri Mamin kecil sekitar 436 ribu ton per tahun.

Faktor harga GKR yang lebih murah dan mutu yang lebih baik dibandingkan GKP, membuat GKR rawan terjadi rembesan atau kebocoran ke pasar GKP. Oleh karenanya setiap pengajuan ijin impor, produsen wajib melampirkan kontrak dan faktur pajak sebagai bukti kerja sama dengan industri pengguna. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Pasar Lelang

Untuk mencegah agar tak terjadi masalah yang lebih serius, lampiran kontrak dan faktur pajak sebagai dasar kerjasama dengan industri pengguna, semestinya wajib dilakukan dalam suatu mekanisme pasar terorganisir.

Konsep pasar terorganisir yang ideal didefinisikan sebagai suatu pasar di mana kompetisi yang terjadi mencerminkan pasar terbuka dengan persaingan sempurna. Pada struktur pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang dan jasa yang dipasarkan bersifat homogen. Hambatan keluar masuk dalam struktur pasar ini relatif rendah.

Penetapan harga dalam struktur pasar ini, penjual maupun pembeli adalah *price taker* sehingga tidak ada pembeli atau penjual yang mempunyai pengaruh besar terhadap harga yang tengah berlangsung.



Kebutuhan gula yang semakin tinggi dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang besar, maka pasar terorganisir menjadi solusi di tengah kelangkaan persediaan dan stabilisasi harga akibat menyusutnya lahan kebun tebu dan rendahnya minat industri mengembangkan perkebunan tebu.

Adanya hambatan informasi harga yang berakibat tingginya biaya transaksi dapat ditekan.

Selain itu, masih banyak keuntungan yang dapat diraih para pelaku pasar- Mamin dengan terbentuknya pasar terorganisir di dalam negeri. Misalnya, jika selama ini industri Mamin harus mengelola persediaan atau kebutuhan dalam jangka panjang, maka harus mempersiapkan gudang dengan biaya pemeliharaan yang tinggi. Tetapi jika ada pasar terorganisir, maka biaya pemeliharaan persediaan dapat ditekan karena kebutuhan GKR pada periode tertentu dapat diperoleh dengan harga yang *fair*.

Salah satu bentuk pasar yang dapat mendekati ke arah pasar persaingan sempurna yakni melalui konsep pasar lelang. Sebab, pasar Lelang merupakan salah satu lembaga pemasaran yang terdapat dalam saluran pemasaran. Saluran pemasaran merupakan rangkaian lembaga- lembaga pemasaran yang melakukan kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen.

Pasar lelang merupakan sarana bertemunya penjual/produsen dan pembeli/pedagang/pabrikasi secara langsung dimana kegiatan ekonomi yang terjadi dilakukan secara transparan tanpa ada kolusi antar pelaku usaha dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Pelelangan adalah suatu institusi ekonomi yang didalamnya terdapat seorang penjual yang menawarkan suatu satuan barang kepada beberapa pembeli, para pembeli tersebut mengajukan sebagai suatu indikator dari tingkat pembayaran yang disanggupi oleh pembeli atas barang yang ditawarkan.

Pertimbangan untuk memasarkan GKR melalui pasar lelang didasari pada adanya pengawasan pemasaran dan distribusi yang terkait dengan siklus produksi dan siklus konsumsi yang menciptakan pola *supply and demand* terutama dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak pasti, musiman, hari raya dalam setiap tahun, fluktuasi harga, *supply and demand* komoditi dunia dan perubahan pola dan orientasi perdagangan domestik serta internasional.

Kehadiran Negara

Kehadiran negara selaku fasilitator dan regulator gula tidak bisa dipungkiri. Melalui kewenangan dimiliki dan komitmen melindungi kaum lemah, negara dapat melakukan tindakan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi lokal. Keberpihakan negara bahkan diperlukan dalam suasana ekonomi dualistik dan terpolarisasikan seperti sekarang. Kegagalan negara dalam menjalankan peran keberpihakan bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup dan masa depan industri gula nasional. Pelaku ekonomi, baik terlibat langsung seperti petani tebu dan pekerja PG maupun komunitas lokal yang selama ini mendapatkan manfaat dari *multiplier effects*, semakin di ujung tanduk ketidakjelasan.

Salah satu bentuk keberpihakan tersebut adalah pengaturan pasar melalui pemilahan segmen secara jelas antara GKR hanya untuk industri makanan/minuman dan gula lokal dari tebu untuk konsumsi langsung (*direct consumption*).

Memang di seluruh dunia, hanya Indonesia yang melakukan separasi dan pembedaan pasar di antara kedua jenis gula. Relevansi

pemisahan semata-mata karena basis persaingan di antara keduanya tidak paralel. GKR berbahan baku *raw sugar* impor dimungkinkan selama masa pengembangan dan berorientasi ekspor mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk 0-5 %.

Tidak menanam tebu selama setahun dengan risiko guncangan agroklimat genggaman gula rafinasi melengkapi tidak paralelnya persaingan. Sementara gula lokal berbahan baku tebu harus dibudidayakan selama setahun dengan risiko besar, khususnya faktor iklim. Selain itu, bila PG berkeinginan mengoptimalkan kapasitas kemudian mengimpor *raw sugar* tetap terkena kewajiban membayar bea masuk Rp 550 per kg.

Banyak pihak salah kaprah dengan menganggap seolah-olah gula lokal tidak siap bersaing melawan rafinasi di pasar tanpa membaca *landscape* persaingan secara proporsional.

Industri gula rafinasi seharusnya sudah membangun kebun di sejumlah daerah. Bila lokasi pabrik sekarang sudah tidak sesuai dengan alasan jauh dari kebun, seharusnya direlokasi saja ke dekat kebun yang bakal dibangun.

Sayangnya negara sendiri tidak berdaya saat sejumlah perusahaan berkeinginan membangun PG dan meminta lahan tersedia bebas permasalahan dan konflik. Tanpa pembangunan kebun selama itu pula gula rafinasi terperangkap impor berkepanjangan. Tidak menjadi masalah kalau harga gula dunia murah, tetapi bisa menjadi bumerang begitu terjadi kegagalan panen di sejumlah negara produsen utama yang memicu minimnya stok dan melejitnya harga seperti kedelai sekarang. Belum adanya tanda-tanda kalangan industri gula rafinasi membangun kebun dan kini sudah eksis 11 pabrik berkapasitas terpasang sekitar 5 juta ton, membuat petani tebu semakin galau. Dari total produksi 2,4 juta ton ton saja sudah memantik kekecewaan petani, apa jadinya kalau kapasitas terpasang tersebut terpenuhi.

Murahnya harga *raw sugar* di pasar dunia dan besarnya pasar di Indonesia menjadikan investasi terkait industri gula rafinasi tak pernah surut. Selama investasi memberikan keuntungan besar, rasanya apa pun bakal ditempuh investor. Ekspansi pabrik memang diperlukan guna mengimbangi permintaan produk oleh kalangan industri makanan/minuman yang berkembang pesat. Namun kalau pembiaran rembesannya ke pasar terus terjadi, komitmen negara terkait perlindungan petani dan PG lokal patut dipertanyakan.

Penguatan basis produksi gula dalam negeri menjadi keharusan sejalan meningkatnya jumlah penduduk dan makin beragamnya menu makanan masyarakat yang memerlukan, baik untuk pemanis berkalori maupun bahan baku. Tanpa upaya konkret, liberalisasi perdagangan dipastikan menggilas kekuatan petani tebu dan PG. Dalam konteks kemandirian pangan, bagaimana pun juga kepentingan nasional harus berada di atas segala-galanya. 

*) *Pemerhati Komoditi.*

(Artikel ini disarikan dari kajian dengan judul; *Tinjauan Kebijakan Pengawasan Pemasaran Gula Kristal Rafinasi*)

Henry Chandra

ILB Lumbung Timah Ekspor

ILB diharapkan menjadi salah satu alternatif mencapai kedaulatan industri tambang timah Indonesia. Adalah Henry Chandra yang kini berupaya keras untuk mewujudkan hal tersebut.

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI atau juga dikenal dengan nama Indonesia Commodity and Derivatives Exchange- ICDX kini telah memiliki anak usaha yakni PT ICDX Logistik Berikat- ILB. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2016, lalu, pasca keluarnya paket kebijakan pemerintah yang mendorong dunia usaha untuk membentuk Pusat Logistik Berikat- PLB di berbagai daerah. Dan sesuai dengan tujuannya, lumbung penyimpanan timah itu disiapkan ILB di sentra produksi Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Pangkal Pinang.

Untuk menggali lebih dalam tentang ILB, **Buletin Bappebti** berhasil mengupas langsung dari Henry Chandra selaku Direktur Utama ILB. "Sebenarnya kalau mau cerita ILB masih 'kepagian'.

Karena memang kita belum beroperasi," ujar Henry merendah, saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Menurut Henry, izin ILB sudah dikeluarkan dari tahun 2016 lalu. Namun untuk dapat dikategorikan sebagai PLB masih menunggu keluarnya Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan.

"Sejumlah PLB telah beroperasi sejak tahun lalu, karena memang PLB itu berorientasi impor. Sedangkan PLB ekspor masih menunggu keluarnya Perdirjen Bea Cukai. Tapi dari informasi yang diperoleh, dalam waktu dekat sudah akan terbit," kata Henry.

Dari sudut pandang Henry Chandra, PLB ekspor akan *booming* di masa mendatang dan *demand*-nya sangat tinggi. "Terobosan inilah yang m e m b u a t

banyak negara tetangga bakal gemetaran. Pasalnya, selama ini timah produksi Indonesia banyak ditimbun di wilayah Singapura. Sehingga, proses perdagangan multilateral justru terjadi di sana. Dan mereka diuntungkan dengan adanya dana pengelolaan gudang."

"Nah, jika timah tersebut dapat disimpan di ILB, maka komposisi perdagangan timah bisa berdaulat. Artinya, timah dapat disimpan ketika harga rendah, dan dikeluarkan saat harga tinggi. Selain itu, ILB akan efektif menurunkan beban biaya logistik dan waktu bongkar muat," terang ayah dua anak ini.

Henry menambahkan, dengan adanya ILB dapat menahan persediaan timah lebih lama di dalam negeri. Dan tidak perlu *gor-goran* ekspor timah. Sebab komoditi timah itu adalah komoditi strategis, komoditi

tambang yang tidak dapat diperbaharui. Beda kalau komoditi itu bisa diproduksi kembali, seperti karet, CPO dan lainnya.

"Jadi, timah jangan diobral dan harus ditahan laju ekspornya.

Dengan itu otomatis akan meningkatkan harga," papar Henry.

"Sesuai mekanisme pasar *supply and demand*,



maka jika barang banjir, harga turun dan kalau barang langka, harga akan naik. Karena itu timah yang sudah tidak dapat diperbarukan, ya harusnya tidak diobral," lanjutnya.

Untuk dapat melakukan itu, kemudahan akses pembiayaan juga diperlukan bagi para pelaku usaha yang menyimpan timah di ILB. "Umumnya pelaku industri timah fokus jualan. Kalau tidak jualan, karyawannya makan apa? Karenanya meskipun harga jatuh, mereka cepat-cepat ingin jual," imbuh Henry.

Maka dengan adanya ILB akan memudahkan pihak bank atau asuransi memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Bunga ataupun preminya bakal rendah, karena barang yang disimpan di ILB sudah terjamin sehingga akan menekan risiko penjaminan, tambahnya.

Di samping itu, Henry mengungkapkan, dengan ILB maka stok timah Indonesia tidak akan diketahui jumlahnya oleh bangsa lain. Dengan begitu, timah tidak bisa dipermainkan oleh para spekulasi luar negeri. "Yang mengetahui jumlah pasti stok timah hanyalah pengelola ILB. Faktor inilah salah satunya yang membuat harga timah lebih mahal. Karena itu juga saya berharap dengan sistem ILB pada komoditi timah, dapat menjadi *role model* bagi komoditas lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Misalnya komoditi CPO atau pun karet," papar Henry.

Pulang Kampung

Perjalanan karir Henry Chandra hingga bisa berlabuh di ILB cukup panjang. Selepas menuntut ilmu di Amerika Serikat, tahun 1987, dia memilih 'pulang kampung' dan bekerja di Indonesia.

"Setelah lulus S1 dan S2 di AS, saya pulang ke Indonesia. Tadinya saya ingin kerja di sana, tapi saya pikir sudah kelamaan di sana, dan teman-teman seangkatan juga sudah pada mencar. Apalagi orang tua dan sanak saudara juga banyak di Indonesia," ujarnya.

Di Indonesia, Henry memilih bekerja di sektor keuangan. Pria kelahiran tahun 1961 ini, dipercaya menjadi direktur di



kantor cabang dari sebuah bank swasta di Jakarta. Lalu, tahun 1993, dia sempat pindah perusahaan di sektor usaha yang sama.

Ketika meletus kerusuhan 1998, Henry Chandra merasa sangat tertekan dan traumatik. Pasalnya, imbas kerusuhan itu sudah dekat dengan tempat tinggalnya. "Saat itu untung ada tetangga yang berprofesi sebagai TNI. Dan beliau bersedia menjaga komplek tempat tinggal kami," kenang Henry.

"Yang membuat saya risau dari kerusuhan 1998, itu, saya dan keluarga tidak diungsikan oleh perusahaan, tapi 'bule-bule' diprioritaskan diamankan ke Singapura," katanya.

Alhasil, Henry dan istri serta dua anaknya bertahan di rumah. "Setiap malam saya ikut ronda bersama tetangga-tetangga perumahan, dan saya perintahkan kepada anak-anak untuk tidur dengan pakaian lengkap. Maksudnya, jika terjadi hal yang tak diinginkan bisa lekas melarikan diri," kisah Henry.

Oleh karena keluarganya masih merasa trauma, di tahun 1999 Henry bersama istri dan anaknya memutuskan pindah ke Singapura. Di sana, Henry kembali mencari kerja dan merintis karirnya dari nol. Sempat berpindah perusahaan, akhirnya Henry bekerja di sebuah anak usaha Sinar Mas Grup yang ada di Singapura.

Namun di tahun 2014, Henry Chandra memutuskan untuk 'pulang kampung' ke Indonesia. Lantaran didorong motivasi untuk merawat dan dekat dengan orang tuanya. "Orang tua di sini semakin tua, dan tentu saja sebagai anak yang berbakti, di sisa-sisa kehidupan mereka mestinya ada anak yang mendampingi. Dan kebetulan saya satu-satunya anak laki-laki, dan dua saudara saya lainnya adalah wanita. Tetapi keputungan saya itu tidak diikuti oleh istri dan anak-anak yang saat itu masih sekolah di Singapura," ucap Henry.

Di tahun yang sama, Henry menjajaki karirnya di BKDI. Di bursa ini, Henry mendapat tugas mendampingi Komisaris Utama BKDI. Di posisi ini, Henry banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman tentang perdagangan timah maupun bursa berjangka.

Singkatnya, di tahun 2016, Henry dipercaya memegang amanat sebagai Dirut ILB. Tentunya sebagai orang yang menahkodai ILB, perjuangan dan kerja keras masih akan terus menuntut Henry. Lepas dari itu semua, pria yang hobi berkebun di pekarangan rumah ini, bercita-cita ingin menjadi petani sukses selepas dirinya pensiun.

"Pengen juga berkebun duren atau apa saja yang menghasilkan. Setidaknya hobi saya itu nantinya bisa menjadi bisnis," tutup Henry Chandra, berseloroh. 🍌

*Selamat
Hari Raya Idul Fitri
1438 H*

“Mohon Maaf Lahir dan Bathin”

**Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
www.bappebti.go.id**